

## **BAB IV**

### **ANALISIS KEPUTUSAN UNI EROPA TERKAIT PERMOHONAN KEANGGOTAAN TURKI TAHUN 2005-2016**

Dalam bab IV ini akan menjelaskan mengenai analisis keputusan Uni Eropa terkait permohonan keanggotaan Turki dari tahun 2005-2016. Ditandai dengan preferensi beberapa negara anggota Uni Eropa yang menyatakan menentang atau tidak setuju terkait dengan permohonan keanggotaan Turki di Uni Eropa. (European Commission, 2016) Preferensi negara-negara oposisi akan penulis jabarkan satu persatu. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan dominasi preferensi Prancis dan Jerman atau dikenal sebagai Franco-German dalam perundingan tingkat intergovernmental.

#### **A. Preferensi Empat Negara Anggota Uni Eropa yang Menentang Keanggotaan Turki**

Posisi masing-masing negara anggota Uni Eropa didukung oleh argumen yang pada akhirnya bertumpu pada masalah politik dan ekonomi, hal itu merupakan konsekuensi dari permohonan keanggotaan Turki di Uni Eropa. Semua argumen ini telah dibentuk sejak awal dimulainya negosiasi tahun 2005 dan telah menegaskan berkali-kali posisi masing-masing negara pendukung atau penentang negosiasi akses Turki ke Uni Eropa. Negara-negara pro Turki bergabung ke Uni Eropa berkonsentrasi pada keuntungan strategis bahwa keanggotaan Turki akan menguntungkan bagi Uni Eropa. Mereka menunjukkan pentingnya geo-strategis dari Turki untuk

merealisasikan kepentingan politik dalam menciptakan lingkungan integrasi yang aman dan makmur. (Kramer, 2006, hal. 28)

Sementara itu, negara-negara penentang keanggotaan Turki di Uni Eropa didasarkan pada argumen dalam bidang ideologi-politik dan ekonomi-sosial. Semua argumen berasal dari keyakinan bahwa Turki adalah negara yang terlalu besar, terlalu miskin, terlalu Islam untuk dapat masuk ke dalam skema Uni Eropa. Mereka menyakini ini adalah dampak publik yang menimbulkan *'enlargement fatigue'* sebagai konsekuensi dari referendum Prancis dan Netherlands tentang Perjanjian Konstitusi yang telah menyebabkan skeptisme umum tentang *further enlargement* di antara sebagian besar masyarakat Eropa dan elit politik Eropa. (Kramer, 2006, hal. 29)

Dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan terkait negara-negara anggota Uni Eropa yang menentang keanggotaan Turki di Uni Eropa. Beberapa preferensi negara penentang keanggotaan Turki di Uni Eropa seperti Prancis, Jerman, Siprus, dan Austria.

### **1. Preferensi Prancis**

Kebijakan Sarkozy terkait akses Turki ke Uni Eropa di antaranya berkaitan dengan meningkatnya sentimen anti-Muslim di Prancis. Sebagian besar terjadi karena kerusuhan Muslim di Prancis meningkat pada tahun 2005. Sementara itu Prancis menanggapi kerusuhan Muslim November 2005 hingga Mei 2007 sebagai bentuk kekhawatiran adanya radikalisme Islam. Dari peristiwa itu Prancis mulai memberlakukan kebijakan ketat untuk menanggulangi radikalisme yang terjadi di Prancis. (Soner Cagaptay, 2007)

Faktanya Prancis merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di Uni Eropa, ada sekitar lima juta Muslim, kebanyakan mereka adalah orang Arab. Jumlah ini sekitar sepuluh persen dari total populasi Prancis sebanyak 62 juta jiwa. Kerusuhan pada bulan November 2005 terjadi terutama di pinggiran kota Paris yang miskin, tapi tidak menutup kemungkinan kerusuhan itu terjadi di kota-kota besar di Prancis. (Soner Cagaptay, 2007)

Kelompok Muslim di Prancis melihat Uni Eropa dan akses Turki sebagai indikasi masa depan mereka di Prancis. Banyak di antara mereka sepakat dan berharap bahwa upaya lama Turki untuk menjadi negara anggota di Uni Eropa dapat tercapai. Presiden Nicolas Sarkozy membuat kebijakan untuk dapat mengintegrasikan Muslim di Prancis, misalnya menunjuk Rachida Dati, seorang imigran perempuan asal Aljazair, Maroko untuk memperkuat posisi di Kementerian Kehakiman. Akan tetapi, kebijakan Sarkozy terkait akses Turki sangat kurang. Sarkozy belum memahami sejauh mana bergabungnya Turki ke Uni Eropa dapat membantu kepemimpinannya dan Prancis. (Soner Cagaptay, 2007)

Hal itu yang menjadikan Sarkozy menentang keras keanggotaan Turki di Uni Eropa. Pada tanggal 26 September 2007, Sarkozy menyatakan dirinya tidak berpikir bahwa Turki memiliki tempat di Eropa, ia mengklaim bahwa sebaliknya tempat Turki berada di '*Asia Minor*'. Pada dasarnya, Sarkozy ingin mengatakan kepada lima juta Muslim Prancis bahwa mereka bisa memiliki tempat di Prancis, jika mengadopsi nilai-nilai Barat (Prancis) dan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga demokratis yang sekuler. Dengan

adanya keputusan menolak Turki bergabung di Uni Eropa. Sesungguhnya Sarkozy mengirimkan pesan kepada Muslim Prancis bahwa “...*regardless of how secular, democratic, and Western you become, there is no official place for you in Europe.*” (Soner Cagaptay, 2007)

Sementara itu pada 29 Mei 2009, Presiden Nicolas Sarkozy membatalkan kunjungan ke Swedia yang dijadwalkan pada 2 Juni 2009 untuk menghindari benturan pembicaraan tentang keanggotaan Turki. Presiden Prancis yang merupakan lawan vokal dari masuknya Turki ke Uni Eropa dengan Perdana Menteri Swedia Fredrik Reinfeldt. (Elitsa Vucheva, 2009) Beberapa politisi khawatir bahwa negara Muslim seperti Turki akan mengubah keseluruhan karakter dari Uni Eropa. Nicolas Sarkozy termasuk dalam politisi yang paling oposisi terhadap bergabungnya Turki ke Uni Eropa. Sarkozy merujuk pada perbedaan kultur dan identitas antara Turki dengan Uni Eropa. (Rahim, 2013, hal. 220)

Pada 2016, Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy berpendapat bahwa Turki secara geografis bukan bagian dari Eropa dan tidak mempunyai tempat di Uni Eropa. François Hollande, pengganti kepemimpinan Sarkozy, juga sama tidak simpatik dengan Turki. (Simon Tisdall, 2016) Pada Maret 2016, François Hollande harus menghadapi skeptisme publik atas konsesi yang diberikan kepada Turki. Presiden Prancis menekankan kemungkinan Ankara untuk mendapat keanggotaan Uni Eropa tetap jauh. Hollande menghadapi tantangan baru setelah kembali dari *EU Summit* di Brussels, Hollande menjelaskan kepada publik Prancis mengapa sangat skeptis atas

konsesi keanggotaan Turki di Uni Eropa. Hal itu merupakan kunci untuk mengambil janji Ankara dalam menanggapi pengungsi agar dapat berlayar ke Eropa. Sebagai bagian dari perjanjian dengan Turki, Uni Eropa telah berjanji untuk membuka bab ke 33 yang merupakan bagian dari negosiasi keanggotaan. Di mana bab ke 33 pernah dibekukan oleh Nicolas Sarkozy pendahulunya Presiden Prancis François Holland.(Anne-Sylvaine Chassany, 2016) Sementara itu, survei pada bulan April 2009 menyatakan bahwa 50% opini publik Prancis menentang Turki menjadi anggota Uni Eropa, sedangkan 35% mendukung Turki bergabung di Uni Eropa. (Sait Akşit,Özgehan Şenyuva, Çiğdem Üstün, 2010)

Diplomat Uni Eropa yang terlibat dalam kesepakatan Uni Eropa-Turki mengatakan bahwa kemungkinan Turki benar-benar menjadi anggota Uni Eropa tetap kecil. Dari 35 bab negosiasi, Turki menyelesaikan 15 bab selama 10 tahun. Tidak ada perubahan dalam posisi Prancis, negosiasi tidak berarti keanggotaan. Proses negosiasi keanggotaan ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Menurut mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron mengatakan bahwa Prancis sebagai contoh anggota Uni Eropa yang akan memveto Turki bergabung dengan blok itu (Uni Eropa). Sedangkan Presiden Prancis menghindari untuk dipandang sebagai pemimpin yang memungkinkan Turki lebih dekat menjadi anggota Uni Eropa. (Anne-Sylvaine Chassany, 2016)

## **2. Preferensi Jerman**

Lebih dari tiga-perempat dari 5,5 juta orang Turki di Uni Eropa menetap di Jerman. Orang Turki yang menetap di Jerman tidak pernah memiliki kemudahan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tiba di Jerman pada awal 1960 untuk memenuhi tenaga kerja manual guna membangkitkan ekonomi Jerman. Tentu saja, hukum kewarganegaraan Jerman sampai tahun 2001 menetapkan bahwa salah satu yang diperlukan untuk mendapatkan kewarganegaraan Jerman adalah memiliki 'darah Jerman'. Oleh karena itu, jutaan orang Turki yang lahir di Jerman dan dalam beberapa kasus, mereka yang kakek-nenek lahir di Jerman, tidak mempunyai hak politik, meskipun mereka telah mematuhi hukum wajib pajak di Jerman selama beberapa dekade. (Soner Cagaptay, 2007)

Hal itu tidak berpengaruh, Turki di Jerman tetap damai dan pekerja keras. Mereka membangun bisnis, membeli rumah, dan memberikan kontribusi kecil untuk membangun Jerman pasca perang. Ketika Jerman mengubah undang-undang kewarganegaraan tahun 2001, sekitar satu juta orang Turki memenuhi syarat untuk diberikan kewarganegaraan Jerman, dan setiap tahun semakin banyak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan. Sejak 2001 pula, ada lima anggota Bundestag (parlemen Jerman) yang berasal dari Turki Jerman. Etnis Turki saat ini ada sekitar satu persen berada di Deputi Bundestag Jerman, hal ini setara dengan persentase aktual dari warga negara asal Turki di Jerman. (Soner Cagaptay, 2007)

Sikap Jerman pada bulan Juni 2012 ketika dilaporkan bahwa mitra koalisi Kanselir Jerman Angela Merkel, *the Christian Democratic Union* (CDU) dan *the Christian Social Union* (CSU) menegaskan bahwa Turki tidak harus menjadi anggota Uni Eropa. Selain itu, semakin banyak orang Eropa menyatakan keprihatinan tentang perubahan orientasi politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan di Turki. (Vincent L. Morelli, 2013)

Pada 3 Juli 2013, Menteri Keuangan Wolfgang Schäuble menyatakan bahwa Turki tidak harus bergabung dengan Uni Eropa karena bukan bagian dari Eropa. (Daily News, 2013) Kanselir Jerman Angela Merkel merupakan salah satu yang mendukung Turki untuk memperoleh “*privileged partnership*” dibandingkan dengan “*full membership*”. Tetapi Turki menolak status *privileged partnership* tersebut. Status yang didukung oleh Merkel, sama artinya dengan tidak mengakui Turki sebagai anggota penuh Uni Eropa. (Rahim, 2013, hal. 220)

Pada April 2014, partai politik di Jerman menyatakan bahwa pencapaian keanggotaan Turki di Uni Eropa agar dihentikan. Tepatnya pada Senin, 31 Maret 2014, Sekretaris Jenderal dari partai *Christian Social Union* (CSU), Andreas Scheuer telah menyerukan bahwa perundingan tentang akses Turki ke Uni Eropa agar dihentikan. Hal itu berkaitan dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan yang menyatakan kemenangan atas partai AKP (*Adelet Ve Kalkinma Partisi*) dalam survei menuju pemilihan presiden ke-12 Turki yang akan dilaksanakan pada Agustus 2014 mendatang. (Kay-Alexander Scholz, 2014)

Pada masa pemilihan Presiden Turki, Perdana Menteri Erdoğan menyebabkan kemarahan di kalangan liberal Turki, Erdoğan saat itu memblokir akses Twitter dan You Tube bagi pengguna internet di Turki karena diklaim bahwa kedua situs itu digunakan untuk menyebarkan kebohongan terhadap pemerintah. Selain itu, Erdoğan dinilai semakin otoriter, setelah mengutuk anggota oposisi sebagai pengkhianat. Andreas Scheuer saat di Munich menyatakan bahwa hal ini jelas Erdoğan tidak termasuk dalam Eropa karena sebuah negara di mana pemerintah mengancam para kritikus dan menginjak-injak nilai-nilai demokratis tidak termasuk di dalam Eropa. (Kay-Alexander Scholz, 2014)

Scheuer menegaskan bahwa Uni Eropa harus menawarkan Turki sebagai *privileged partnership*, pernyataan ini bertujuan untuk partai *Social Democratic Party and the Greens* serta Merkel dan rekan-rekannya di *Christian Social Union (CSU)* agar mendukung status *privileged partnership* daripada *full membership*. Sementara itu, reaksi partai *Christian Democratic Union (CDU)* relatif tenang. Kepala Pengawas Parlemen, Michael Grosse-Brömer mengkritik terkait pelarangan penggunaan Twitter di Turki, ia mengatakan bahwa jejaring sosial itu untuk mengekspresikan pendapat di mana hal itu merupakan bagian dari demokrasi. (Kay-Alexander Scholz, 2014)



### 3. Preferensi Siprus

Perseteruan Siprus-Turki sudah berlangsung beberapa dekade. Siprus menuntut Turki untuk terlebih dahulu mengakui kedaulatan Siprus. Sampai saat ini, Turki tidak mengakui pemerintahan Siprus. Sebaliknya, Siprus yang merupakan negara anggota Uni Eropa memblokade delapan bab penting terkait negosiasi Turki menjadi anggota Uni Eropa. Delapan bab tersebut tidak akan dibuka dan ditutup untuk sementara waktu. (European Commission, 2016) Enam dari delapan bab yang diblokade dengan hak veto Siprus yakni: (William Chislett, 2015)

- a. *Chapter 2 tentang Freedom of movement for workers (blocked, Cyprus veto, December 2009)*
- b. *Chapter 15 tentang Energy (blocked, Cyprus veto, December 2009)*
- c. *Chapter 23 tentang Judiciary and fundamental rights (blocked, Cyprus veto, December 2009)*
- d. *Chapter 24 tentang Justice, freedom and security (blocked, Cyprus veto, December 2009)*
- e. *Chapter 26 tentang Education and culture (blocked, Cyprus veto, December 2009)*
- f. *Chapter 31 tentang Foreign, security and defence policy (blocked, Cyprus veto, December 2009)*

Sejak saat itu, keanggotaan Turki tidak pernah dibicarakan oleh Uni Eropa. Siprus mengancam akan memveto kesepakatan Uni Eropa-Turki. Siprus menuntut Turki untuk terlebih dulu mengakui kedaulatan Siprus. Pulau Siprus terbelah menjadi dua. Wilayah sebelah selatan didominasi oleh keturunan Yunani dan wilayah utara didominasi oleh keturunan Turki. Turki menganeksasi Siprus bagian utara tahun 1974 dan menyebutnya sebagai Republik Turki Siprus Utara. Sementara dunia internasional mengakui seluruh pulau sebagai Negara Siprus yang bagian utaranya diokupasi oleh Turki.

**Gambar IV-1 The Self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus**



(BBC News, 2016)

Presiden Siprus Nicos Anastasiades menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima tuntutan Turki ‘sebelum Turki terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya (mengakui Siprus)’. Sementara itu, Presiden Uni Eropa Donald Tusk menyampaikan bahwa persetujuan Siprus-Turki merupakan tugas sulit, perlu kerja keras. (Harian Kompas, 2016, hal. 9)

#### 4. Preferensi Austria

Austria berpendapat bahwa negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa berkepanjangan karena dua alasan, yakni pertama, kerangka secara eksplisit menyebutkan kemungkinan bahwa pembicaraan negosiasi keanggotaan bisa menghasilkan *privileged partnership* daripada *full membership*. Kedua, ada pembatasan kapasitas di Uni Eropa dalam menerima negara anggota baru. (BBC News- Europe, 2006) Menteri Luar Negeri Austria Ursula Plassnik periode jabatan tahun 2004-2008 menegaskan bahwa saat ini harus dibuat jelas bahwa kemampuan Uni Eropa mengambil tindakan dalam kondisi yang harus dipenuhi oleh Turki apabila ingin bergabung di Uni Eropa, atau hal itu tidak akan terjadi. (BBC News-Europe, 2005)

Sementara itu, Kanselir Austria Wolfgang Schuessel periode jabatan tahun 2000-2007 menegaskan bahwa untuk pertama kalinya kami telah menetapkan kondisi tambahan yang akan sangat penting bagi masa depan Eropa, yaitu kemampuan Uni Eropa dalam menerima anggota baru. Dalam kaitannya dengan Turki tidak memenuhi syarat, alternatif yang ditetapkan seperti istilah *strongest possible bond*. Hal ini yang berlaku sama jika Uni Eropa tidak dapat menerima Turki. Bagi warga Eropa, kami telah menciptakan kepastian bahwa mereka tidak hanya seperti mesin giling, dan negosiasi keanggotaan itu bukan awal dari mesin otomatis yang tidak bisa dihentikan. (BBC News-Europe, 2005) Austria menjadi negara dengan persentase oposisi tertinggi yakni mencapai 81 persen yang menyatakan penolakannya terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa. (Eurobarometer 74 Autumn, 2011)

## **B. Dominasi Preferensi Prancis dan Jerman (Franco-German) dalam Perundingan Tingkat Intergovernmental**

Proses tawar-menawar antar pemerintah di tingkat Eropa juga akan memperkuat *vis-à-vis* politik dalam negeri masing-masing negara:

*National governments are able to take initiatives and reach bargains in Council negotiations with relatively little constraint. The European Communities provides information to governments that is not generally available . . . National leaders undermine potential opposition by reaching bargains in Brussels first and presenting domestic groups with an 'up or down' choice . . . Greater domestic agenda-setting power in the hands of national political leader increase the ability of governments to reach agreements by strengthening the ability of governments to gain domestic ratification for compromises or tactical issue linkages. (Rosamond, 2000, hal. 138)*

Dampak akan keanggotaan Turki di Uni Eropa salah satunya adalah perimbangan kekuatan di lembaga-lembaga Uni Eropa. Representasi Turki di lembaga-lembaga Uni Eropa berdasarkan kesimpulan *The Nice Summit* pada Desember 2000 dan disepakatinya Konvensi Eropa yang masih menunggu pengesahan dalam menyelesaikan struktur perluasan Uni Eropa. Maka, keputusan yang dibuat dalam *The Nice Summit* tersebut, jika Turki adalah negara anggota Uni Eropa, Turki akan diwakili dengan 74 kursi anggota di Parlemen (seperti Prancis, Inggris dan Italia) dan memiliki 29 suara di Dewan Uni Eropa (seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia). Selain itu, Turki bisa mengirimkan 1.000-1.500 birokrat untuk mengisi di Komisi Eropa dan lembaga-lembaga lain di Uni Eropa. (Faruk Sen, 2010)

**Tabel IV.1 Perimbangan Kekuatan Turki di Parlemen**

<b>Member States</b>	<b>Number of MEPs</b>
France	74
United Kingdom	73
Italy	73
<b>Turkey</b>	<b>74</b>
<b>Total EU+1</b>	<b>825</b>

(Faruk Sen, 2010)

Sebagai negara dengan populasi yang besar, Turki akan memperoleh signifikansi dalam perkembangan baru ini. Kekuasaan Turki di Dewan Uni Eropa akan menjadi lebih kuat. Selain itu, Turki sama seperti negara anggota lain akan memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi Komisioner. Konstitusi Uni Eropa diramalkan akan mengalami penurunan jumlah Komisioner setelah tahun 2009. Sementara ini belum ditetapkan seberapa besar pengurangan ini yang jelas bahwa negara anggota Uni Eropa tidak akan memiliki lebih dari satu Komisioner. (Faruk Sen, 2010)

Seperti pada perluasan keanggotaan sebelumnya, akses Turki juga akan berdampak di berbagai institusi Uni Eropa. Hal ini diasumsikan bahwa Konstitusi akan diadopsi dan berlaku pada saat keanggotaan Turki. Konstitusi bertujuan untuk membuat lembaga dan prosedur yang lebih efisien dan efektif untuk menjamin kelancaran fungsi dalam Uni Eropa yang terdiri lebih dari 25 negara anggota. Jumlah populasi setiap negara menjadi determinan penting dalam menentukan permohonan keanggotaan Turki, mengingat bahwa hingga

tahun 2015 Turki memiliki populasi yang sama dengan Jerman. (Commission of The European Communities, 2004)

Di dalam konstitusi kursi di Parlemen Eropa setelah tahun 2009 tidak melebihi 750 kursi dengan batas minimum 6 kursi dan maksimum 96 kursi untuk setiap negara anggota. Peningkatan dari 732 kursi menjadi 750 kursi. Hal ini ditujukan untuk mengakomodasi lebih lanjut terkait perluasan Uni Eropa. Keanggotaan Turki secara signifikan akan mempengaruhi alokasi kursi untuk negara-negara anggota Uni Eropa saat ini. Khususnya negara-negara yang sedang dan besar harus menyerahkan kursi untuk mengakomodasi keanggotaan Turki di Uni Eropa.

Dewan menggunakan sistem *voting*, konstitusi telah memperkenalkan sejak 1 November 2009, hal ini berkaitan dengan suara terbanyak yang memenuhi syarat (*Qualified Majority Voting/ QMV*). Didefinisikan setidaknya 55% dari anggota Dewan yang terdiri setidaknya lima belas dari mereka dan mewakili negara anggota setidaknya terdiri dari 65% dari penduduk Uni Eropa. Selain itu, apabila minoritas ingin memblokir harus menyertakan setidaknya empat anggota Dewan. Terkait dengan akses Turki upaya minoritas memblokir dapat lebih mudah dicapai dari sisi populasi oleh sejumlah kecil negara-negara yang besar.

Sebagai konsekuensi, 27 negara anggota Uni Eropa ditambah Turki yang terakhir akan mengalami beban berat dalam proses pengambilan keputusan. Kurang lebih atau setara dengan yang disebutkan atas pembagian populasi di Uni Eropa, hal itu akan memberikan suara penting dalam proses

pengambilan keputusan. Akses Turki akan memiliki dampak pada kelembagaan dalam Komisi. Di bawah Komisi, mulai tahun 2014 terdiri dari sejumlah anggota termasuk Presiden dan Menteri Luar Negeri, sesuai dengan dua pertiga dari jumlah negara-negara anggota, kecuali Dewan Eropa yang bertindak secara *unanimity*. Para anggota harus dipilih atas dasar sistem rotasi yang sama antara negara anggota. (Commission of The European Communities, 2004)

Keputusan penting terkait dengan perluasan keanggotaan Uni Eropa diambil oleh dua lembaga Uni Eropa dengan karakter intergovernmental yakni Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa (Dewan Menteri-menteri). Arsitektur kedua kelembagaan Uni Eropa ini menyoroiti peran yang dimainkan oleh negara-negara anggota dalam pembentukan proses akses negara kandidat. (Ebru Turhan, 2016)

Dewan Eropa dan Dewan Menteri adalah lembaga utama intergovernmental di Uni Eropa, yang terdiri dari kepala negara atau pemerintah, serta menteri-menteri negara anggota yang cenderung bertindak atas konstitusi domestik dan melindungi konflik kepentingan nasional. Dalam intergovernmental, keputusan diambil dengan cara tawar-menawar strategis antarnegara dan negosiasi, di mana negara-negara anggota yang lebih besar dengan kemampuan yang lebih besar secara struktural seperti (ekonomi, penduduk, militer dan geografi) akan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kekuasaan politik. (Ebru Turhan, 2016)

Secara kemampuan struktural kumulatif baik politik dan ekonomi, Jerman telah mengasumsikan peran kepemimpinan bersama Prancis dan Inggris, proses tawar-menawar antar pemerintah di dalam Uni Eropa, yang berujung pada pengembangan kebijakan umum. Hal itu berlaku juga dalam proses pengambilan keputusan dalam hal menentukan politik perluasan keanggotaan Uni Eropa seperti upaya Turki bergabung dengan Uni Eropa. Sehingga negara besar seperti Prancis dan Jerman bertindak sebagai pemain utama dalam pembentukan hubungan dengan Turki dan proses aksesinya ke Uni Eropa. (Ebru Turhan, 2016)

Sementara itu pada tahun 2013, Uni Eropa menunda pembicaraan keanggotaan Turki setelah mendapat tekanan dari Jerman. Menteri Luar Negeri Uni Eropa telah mendukung proposal Jerman untuk menunda pembicaraan keanggotaan Turki di Uni Eropa selama empat bulan ke depan. Pembicaraan Uni Eropa-Turki dijadwalkan sebelumnya, akan tetapi Jerman, Austria dan Belanda mengkritik keras tindakan Turki terkait protes anti-pemerintah di Turki. Polisi Turki menangkap setidaknya 20 orang di Ankara. Media Turki mengatakan para tersangka dituduh terlibat dalam organisasi teror. (BBC News, 2013)

Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu untuk meredakan ketegangan dengan Turki. Ahmet Davutoglu optimis bahwa tidak ada halangan untuk perundingan Turki dengan Uni Eropa. Turki memulai negosiasi aksesinya dengan



Uni Eropa pada tahun 2005, pada saat yang sama dengan Kroasia. Namun, Kroasia telah lebih dahulu bergabung dengan blok 27 negara pada 1 Juli 2013.

Di sisi lain pembicaraan Turki telah terhenti selama tiga tahun dan hasil dari laporan Komisi Uni Eropa tentang kemajuan Ankara dinilai masih memiliki kekhawatiran terkait demokrasi dan hak asasi manusia. Seperti semua calon negara anggota, Turki harus memenuhi persyaratan Uni Eropa. Tahun 2012 Turki telah menerima 856 M Euro berupa bantuan Uni Eropa untuk membantu reformasi kelembagaan yang diperlukan. (BBC News, 2013)

Sikap Kanselir Jerman Angela Merkel terkait permohonan keanggotaan Turki di Uni Eropa masih tetap menginginkan Turki sebagai *privileged partnership* daripada *full membership* dengan Uni Eropa. (BBC News, 2013) Keputusan Angela Merkel bahwa Turki sebaiknya diberikan *privileged partnership* karena sejak tahun 2001, sekitar satu juta orang Turki memenuhi syarat kewarganegaraan Jerman dan setiap tahun semakin banyak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan. Alasan lainnya berkaitan dengan partai politik pendukung pemerintah seperti CDU, CSU, *Social Democratic Party* dan *the Greens* mendukung status *privileged partnership*. Hal itu didasari oleh *statement* dari Sekretaris Jendral Andreas Scheuer dari partai CSU tahun 2014 pasca Erdoğan mengutuk anggota oposisi sebagai penghianat. Andreas Scheuer menegaskan bahwa sebuah negara di mana pemerintah mengancam para kritikus dan menginjak-injak nilai-nilai demokratis tidak termasuk di dalam Eropa.

Dominasi preferensi Prancis terkait keanggotaan Turki antara lain, Prancis menyatakan secara sepihak untuk memblokir pembukaan beberapa bab negosiasi. Pada tahun 2007, Prancis menyatakan tidak mengizinkan atau memblokir lima bab antara lain: bab 11 (*Agriculture and rural development*), bab 17 (*Economic and monetary policy*), bab 22 (*Regional policy and coordination of structural instruments*), bab 33 (*Financial and budgetary provisions*), bab 34 (*Institutions*). (William Chislett, 2015)

Kebijakan Nicolas Sarkozy tersebut didasari oleh meningkatnya sentimen anti-Muslim di Prancis. Sebagian besar terjadi karena kerusuhan Muslim di Prancis meningkat sejak tahun 2005. Hal itu menimbulkan kekhawatiran adanya radikalisme Islam di Prancis. Selain itu, Prancis merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di Uni Eropa, ada sekitar lima juta Muslim, kebanyakan mereka adalah orang Arab.

Sarkozy tidak berpikir bahwa Turki memiliki tempat di Eropa, ia mengklaim bahwa sebaiknya tempat Turki berada di '*Asia Minor*'. Ia menambahkan bahwa keputusannya menolak Turki bergabung di Uni Eropa sesungguhnya bagaimanapun Muslim di Prancis menjadi sekuler, menjadi demokratis dan menjadi Barat (menerapkan nilai-nilai Barat), tetap tidak ada tempat resmi untuk Muslim di Prancis.

Sementara itu, Presiden Prancis saat ini François Hollande telah memberikan konsesi kepada Turki terkait pembicaraan pembukaan bab ke 33 yang pernah dibekukan oleh Nicolas Sarkozy. Respon terhadap pemberian konsesi kepada Turki menjadikan pandangan skeptisme publik terhadap

Presiden mereka. Hollande berdalih bahwa pembicaraan pembukaan bab ke 33 merupakan kunci untuk mengambil janji Ankara dalam menangani pengungsi agar tidak menuju ke Eropa terutama negara Prancis. Di sisi lain, opini publik Prancis pada April 2009 menyatakan bahwa 50% publik Prancis masih menentang Turki menjadi anggota Uni Eropa, sedangkan hanya 35% mendukung Turki bergabung di Uni Eropa.

Dominasi preferensi Prancis-Jerman terakomodasi dalam institusi Uni Eropa. Hal ini dibuktikan bahwa Prancis dan Jerman memiliki dua perwakilan Komisioner dalam Komisi Eropa, sedangkan negara-negara selain Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman hanya mendapatkan satu kursi Komisioner di Komisi Eropa. Sementara itu dalam lembaga intergovernmental seperti Dewan Uni Eropa Prancis mendapatkan 12,98 persentase *vote* dari total populasi negara Prancis. Sedangkan Jerman mendapatkan persentase 15,93 *vote* dari total populasi negara Jerman. Apabila minoritas ingin memblokir harus menyertakan setidaknya empat anggota Dewan, terkait dengan akses Turki upaya minoritas memblokir dapat lebih mudah dicapai dari sisi populasi negara oleh sejumlah kecil negara-negara besar.

Hal itu memungkinkan bagi Prancis dan Jerman karena kedua negara memenuhi dari sisi populasi negara dalam pembuatan keputusan di Dewan Uni Eropa. Dalam institusi Parlemen Eropa, keterwakilan anggota Parlemen Jerman ada 96 orang perwakilan, sedangkan Prancis 74 orang perwakilan. Representasi anggota parlemen terbesar lainnya yakni Italia dan Inggris.

Sementara itu Inggris pada tahun 2016 menyatakan referendum atas keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Daya tawar-menawar Prancis dan Jerman dalam perundingan terkait akses Turki ke Uni Eropa cenderung memiliki kekuatan lebih besar daripada negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Hal tersebut memungkinkan Prancis dan Jerman memiliki lebih banyak kepentingan yang dapat terpenuhi. Sementara itu akumulasi daya tawar-menawar enam negara pendukung (Portugal, Italia, Swedia, Republik Ceko, Spanyol, dan Inggris) keanggotaan Turki tidak dapat menyaingi dominasi dua kekuatan seperti Prancis dan Jerman.